

PENGADILAN AGAMA BANGKALAN
LAPORAN KEUANGAN
Semester I Tahun 2024

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2024

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Soekarno Hatta No. 49 Bangkalan

Bangkalan – Jawa Timur 69161

Telp. 031-3095582 Fax. 031-3061482

e-mail : pabangkalan@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Semester I Tahun 2024

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2024

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Soekarno Hatta No.49 Bangkalan

Telp. 031-3095582 Fax. 031-3061482

Bangkalan - Jawa Timur 69161

e-mail : pabangkalan@gmail.com

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Bangkalan adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Badan Urusan Administrasi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bangkalan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Bangkalan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Bangkalan, 17 Juli 2024

Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Agama Bangkalan



[Handwritten Signature]
H.ARIS DWI SUTIYONO,S.T.,S.H

NIP. 19691216 200502 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	vi
RINGKASAN	vii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	ix
NERACA	x
LAPORAN OPERASIONAL	xi
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	xii
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
A. PENJELASAN UMUM	1
A.1. Dasar Hukum.....	1
A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis	2
A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	4
A.4 Basis Akuntansi.....	4
A.5 Dasar Pengukuran	4
A.6. Kebijakan Akuntansi	5
(1.) Pendapatan LRA	5
(2.) Pendapatan LO	5
(3.) Belanja	6
(4.) Beban.....	6
(5.) Aset	6
a. Aset Lancar.....	6
b. Aset Tetap	8
c. Penyusutan Aset Tetap	9

d. Piutang Jangka Panjang.....	10
e. Aset Lainnya	10
(6.) Kewajiban	11
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	12
B.1 Pendapatan	12
B.2 Belanja Pegawai.....	16
B.3 Belanja Barang.....	16
B.4 Belanja Modal.....	17
B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	18
B.4.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	19
B.4.3 Belanja Modal Jaringan	19
B.4.4 Belanja Modal Lainnya	19
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA.....	21
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran.....	21
C.2 Belanja Dibayar Dimuka (<i>Prepaid</i>)	21
C.4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak.....	23
C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	23
C.6 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi.....	23
(TGR).....	23
C.7 Persediaan	24
C.8 Tanah	24
C.9 Peralatan dan Mesin.....	29
C.11 Jalan, Irigasi dan Jaringan	30
C.12 Aset Tetap Lainnya	30
C.13 Konstruksi Dalam Pengerjaan	31
C.14 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	32
C.15 Piutang Tagihan TP/TGR.....	32
C.16 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	33

C.17 Aset Tak Berwujud.....	33
C.18 Aset Lain–Lain.....	33
C.19 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya.....	34
C.20 Utang kepada Pihak Ketiga.....	34
C.21 Utang yang belum ditagihkan.....	35
C.22 Pendapatan Diterima di Muka.....	35
C.23 Uang Muka dari KPPN.....	36
C.24 Ekuitas.....	36
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL.....	41
D.1Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	41
D.2Beban Pegawai.....	41
D.3Beban Persediaan.....	42
D.4Beban Barang dan Jasa.....	42
D.5.Beban Pemeliharaan.....	43
D.7Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	44
D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.....	45
D.10 Surplus dari Kegiatan Non Operasional.....	45
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	50
E.1 Ekuitas Awal.....	50
E.2 Defisit LO.....	50
E.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap.....	50
E.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi.....	50
E.5Koreksi Lain-lain.....	50
E.6Transaksi Antar Entitas.....	50
E.6.1Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	51
E.6.2 Transfer masuk.....	51
E.7Ekuitas Akhir.....	51
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA.....	52

F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	52
F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	52
F.3. Pengungkapan Lain-Lain	52

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan</i>	<i>13</i>
<i>Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNBP TA 2024 dan TA 2023</i>	<i>14</i>
<i>Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 30 Juni 2024</i>	<i>14</i>
<i>Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dan TA 2023</i>	<i>15</i>
<i>Tabel 5. Perbandingan Belanja Pegawai TA 2024 dan TA 2023</i>	<i>16</i>
<i>Tabel 6. Perbandingan Belanja Barang TA 2024 dan TA 2023</i>	<i>17</i>
<i>Tabel 8. Perbandingan Belanja Modal TA 2024 dan TA 2023</i>	<i>18</i>
<i>Tabel 9. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan TA 2023</i>	<i>18</i>
<i>Tabel 10. Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dan TA 2023</i>	<i>19</i>
<i>Tabel 11. Perbandingan Belanja Modal Jaringan TA 2024 dan TA 2023</i>	<i>19</i>
<i>Tabel 12. Perbandingan Belanja Modal Lainnya TA 2024 dan TA 2023</i>	<i>20</i>
<i>Tabel 13. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran</i>	<i>21</i>
<i>Tabel 14. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023</i>	<i>22</i>
<i>Tabel 15. Rincian Piutang Bukan Pajak Per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023</i>	<i>22</i>
<i>Tabel 16. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak Per 30 Juni 2024</i>	<i>23</i>
<i>Tabel 17. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi</i>	<i>23</i>
<i>Tabel 18. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi</i>	<i>24</i>
<i>Tabel 19. Rincian Persediaan</i>	<i>24</i>
<i>Tabel 20. Rincian Saldo Tanah Per 30 Juni 2024</i>	<i>26</i>
<i>Tabel 21. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</i>	<i>32</i>
<i>Tabel 22. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya</i>	<i>34</i>
<i>Tabel 23. Perbandingan Rincian Pendapatan 30 Juni 2024 dan 2023</i>	<i>41</i>
<i>Tabel 24. Perbandingan Rincian Beban Pegawai 30 Juni 2024 dan 2023</i>	<i>42</i>
<i>Tabel 25. Perbandingan Rincian Beban Persediaan 30 Juni 2024 dan 2023</i>	<i>42</i>
<i>Tabel 26. Rincian Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2024 dan 2023</i>	<i>43</i>
<i>Tabel 27. Rincian Beban Pemeliharaan 30 Juni 2024 dan 2023</i>	<i>44</i>
<i>Tabel 28. Rincian Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2024 dan 2023</i>	<i>44</i>
<i>Tabel 29. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi</i>	<i>45</i>
<i>Tabel 30. Rincian Beban Piutang tak Tertagih 30 Juni 2024 dan 2023</i>	<i>45</i>
<i>Tabel 31. Rincian Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2024 dan 2023</i>	<i>46</i>

Pengadilan Agama Bangkalan

Jl. Soekarno Hatta No.49 Bangkalan

Telp. 031-3095582 Fax. 031-3061482 e-mail : pa-bangkalan.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bangkalan Semester I Tahun 2024 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sampai dengan 30 Juni 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bangkalan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bangkalan, 17 Juli 2024

Kuasa Pengguna Anggaran



H. Aris Dwi Sutiyono, S.T.,S.H

NIP. 19691216 200502 1 001

RINGKASAN

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bangkalan Semester I Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2024.

Realisasi Pendapatan Negara TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.0 dari estimasi pendapatan sebesar Rp.0 atau mencapai 0 persen.

Realisasi Belanja Negara TA 2024 adalah sebesar Rp.2.633.250.574 atau mencapai 48,91 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.5.384.415.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2024.

Nilai Aset per 30 Juni 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp.16.399.034.256 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp.33.299.490; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.16.365.734.766; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban per 30 Juni 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp.301.423.018.

Ekuitas per 30 Juni 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp.16.097.611.238.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.2.900.927.885, sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(2.900.927.885). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar Rp(2.900.927.885).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp.16.365.288.549 dikurangi defisit-LO sebesar Rp(2.900.927.885), kemudian ditambah dengan koreksi yang mengurangi ekuitas sebesar Rp.0 dan ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.2.633.250.574 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2024 adalah senilai Rp.16.097.611.238.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA BANGKALAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
30 JUNI 2024 DAN 30 JUNI 2023

URAIAN	CATATAN	TA 2024			TA 2023		
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN
PENDAPATAN							
1. Pendapatan	B.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA							
1. Belanja Pegawai	B.2	3.886.114.000,00	1.962.612.379,00	50,50	3.744.477.000,00	2.078.430.383,00	55,51
2. Belanja Barang	B.3	1.498.301.000,00	670.638.195,00	44,76	1.526.969.000,00	619.707.393,00	40,58
3. Belanja Modal	B.4	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.900.000,00	99,00
Jumlah Belanja		5.384.415.000,00	2.633.250.574,00	48,91	5.281.446.000,00	2.708.037.776,00	51,27

NERACA

PENGADILAN AGAMA BANGKALAN
NERACA
PER 30 JUNI 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	JUMLAH	
		30 JUNI 2024	31 DESEMBER 2023
1	2	3	4
ASET			
Aset Lancar	C		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C. 1	30.000.000	-
Belanja dibayar dimuka		-	483.604,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C. 2	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C. 3	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C. 4	-	-
Piutang Bukan Pajak (Netto)		-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ga	C. 5	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C. 6	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)		-	-
Persediaan	C. 7	3.299.490	738.200
Jumlah Aset Lancar		33.299.490	1.221.804
Aset Tetap			
Tanah	C. 8	10.277.875.000	10.277.875.000
Peralatan dan Mesin	C. 9	2.773.418.298	2.773.418.298
Gedung dan Bangunan	C. 10	7.195.003.500	7.195.003.500
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C. 11	-	-
Aset Tetap Lainnya	C. 12	1.501.309	1.501.309
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C. 13	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C. 14	(4.032.159.849)	(3.882.063.341)
Jumlah Aset Tetap		16.215.638.258	16.365.734.766
Piutang Tagihan TP/TGR	C. 15	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	C. 16	-	-
Tagihan TP/TGR (Netto)		-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C. 17	-	-
Aset Lain-Lain	C. 18	19.636.500	170.018.719
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C. 19	(19.636.500)	(170.018.719)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		16.248.937.748	16.366.956.570
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C. 20	269.879.018	1.668.021
Pendapatan Diterima Dimuka	C. 21	-	-
Uang Muka dari KPPN	C. 22	30.000.000	-
Utang Yang Belum Ditagihkan		1.544.000	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		301.423.018	1.668.021
JUMLAH KEWAJIBAN		301.423.018	1.668.021
EKUITAS			
Ekuitas	C. 23	15.947.514.730	16.365.288.549
JUMLAH EKUITAS		15.947.514.730	16.365.288.549
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		16.248.937.748	16.366.956.570

LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN AGAMA BANGKALAN LAPORAN OPERASIONAL 30 JUNI 2024 DAN 30 JUNI 2023

URAIAN	CATATAN	TA 2024	TA 2023
1	2	3	4
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
PENDAPATAN PERPAJAKAN		-	-
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA		-	-
PENDAPATAN HIBAH		-	-
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	D. 1	-	-
BEBAN			
BEBAN PEGAWAI	D. 2	2.191.142.397	2.309.359.701
BEBAN PERSEDIAAN	D. 3	8.358.350	11.935.475
BEBAN BARANG DAN JASA	D. 4	472.368.506	521.355.498
BEBAN PEMELIHARAAN	D. 5	178.591.344	113.398.659
BEBAN PERJALANAN DINAS	D. 6	50.467.288	37.120.000
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	D. 7	150.096.508	151.714.337
BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	D. 8	-	-
JUMLAH BEBAN		3.051.024.393	3.144.883.670
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(3.051.024.393)	(3.144.883.670)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA	D. 9	(3.051.024.393)	(3.144.883.670)
POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS (DEFISIT) LO		(3.051.024.393)	(3.144.883.670)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN AGAMA BANGKALAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
30 JUNI 2024 DAN 30 JUNI 2023

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2024	30 JUNI 2023
1	2	3	4
EKUITAS AWAL	E. 1	16.365.288.549,00	16.240.655.776,00
SURPLUS / DEFISIT	E. 2	(3.051.024.393,00)	(3.144.883.670,00)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI			
EKKUITAS			
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN		-	-
KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR			
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 3	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 4	-	-
Koreksi lain-lain	E. 5		-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E. 6	2.633.250.574,00	2.742.775.276,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(417.773.819,00)	(402.108.394,00)
EKUITAS AKHIR	E. 7	15.947.514.730,00	15.838.547.382,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar
Hukum

A.1. Dasar Hukum

1. ;

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

2. ;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 90/PMMK.06/2014;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis Rencana Strategis

Rencana Strategis Pengadilan Agama Bangkalan Tahun 2020-2024 merupakan lanjutan dari Renstra Pengadilan Agama Bangkalan Tahun 2015-2019 adalah menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dengan Indikator Sasaran dan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2020-2024.

Visi Pengadilan Agama Bangkalan adalah mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Indonesia yaitu "Terwujudnya Pengadilan Agama Bangkalan yang Agung"

Misi Pengadilan Agama Bangkalan adalah :

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Bangkalan melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya perkara yang diselesaikan tepat waktu.
3. Terwujudnya penurunan sisa perkara.
4. Terwujudnya peningkatan perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum banding, Kasasi dan PK.
5. Terwujudnya peningkatan Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
6. Terwujudnya peningkatan Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.
7. Terwujudnya peningkatan Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi.
8. Terwujudnya peningkatan berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.
9. Terwujudnya peningkatan putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.
10. Terwujudnya peningkatan Perkara Prodeo yang diselesaikan.
11. Terwujudnya peningkatan Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.
12. Terwujudnya peningkatan Perkara Permohonan(*Voluntair*) Identitas Hukum.
13. Terwujudnya peningkatan Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).
14. Terwujudnya peningkatan Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).
15. Terwujudnya peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja).
16. Terwujudnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja sesuai jadwal yang ditindaklanjuti.
17. Terwujudnya peningkatan pemeliharaan sarana dan prasana yang menunjang pelayanan prima.
18. Terwujudnya ketertiban admintrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti.
19. Terwujudnya peningkatan disiplin Pegawai.
20. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan /diklat secara tepat waktu.
21. Terwujudnya peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti.

Tujuan

Terkoordinasinya pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, administrasi kepegawaian, finansial, perlengkapan dan ketatausahaan pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung .

A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4 Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Bangkalan adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan, diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizeble value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (*satu juta rupiah*);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggal jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset lain-lain pada pos Aset lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BUMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a) Tanah
 - b) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
 - c) Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan Pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Anggaran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12(dua belas) bulan, Aset kerjasama dengan pihak ketiga (Kemitraan), dan Kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KMK.06/2015 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi,Hak paten Sederhana,Merk,Desain Industri,Rahasia Dagang,Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten biasa,Perlindungan varietas tanaman semusim	20
Hak cipta karya seni terapan, perlindungan varietas tanaman tahunan	25
Hak cipta atas ciptaan Gol.II, Hak ekonomi pelaku pertunjukan, Hak ekonomi Produser fonogram	50
Hak cipta atas ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pengadilan Agama Bangkalan telah melaksanakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal berupa pergeseran atau revisi POK. Revisi POK dilaksanakan untuk menertibkan administrasi seperti menggeser pagu anggaran dan rencana penarikan dana. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain :

Uraian	Tahun 2024	
	Anggaran Awal	Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Lain-lain		
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	3.886.114.000	3.886.114.000
Belanja Barang	1.498.301.000	1.498.301.000
Belanja Modal	-	-
Jumlah Belanja	5.384.415.000	5.384.415.000

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp.0 dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Pengadilan Agama Bangkalan adalah sebagai berikut:

*Realisasi
Pendapatan Rp.0*

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	2024		
		Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	0,00
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya			
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan			
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin		-	
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya		-	
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain			
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-		
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-		
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-		
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-		
Jumlah Pendapatan Bruto		-	-	0,00
Pengembalian		-	-	
Jumlah Pendapatan Netto		-	-	0,00

Perbandingan realisasi PNBP TA 2024 dan TA 2023 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNBP TA 2024 dan TA 2023

(dalam rupiah)

KODE	Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
425122	Pendapatn dari Penjualan Peralatan dan Mesin				
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya				
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan				
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	-	-	-	-
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain				
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-			
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu				-
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu				-
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu				-
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji		-		-

Belanja

Realisasi Belanja Pengadilan Agama Bangkalan pada periode 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp.2.633.250.574 atau 48,91% dari anggaran belanja sebesar Rp.5.384.415.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja periode 30 Juni 2024 tersaji sebagai berikut:

Realisasi
Belanja
Negara

Rp.2.633.250.574

Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 30 Juni 2024

(dalam rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
51	Belanja Pegawai	3.886.114.000,00	1.962.613.063,00	50,50
52	Belanja Barang	1.498.301.000,00	670.638.195,00	44,76
53	Belanja Modal	-	-	0,00
Jumlah Belanja Bruto		5.384.415.000,00	2.633.251.258,00	48,91
Pengembalian Belanja		-	684,00	
Jumlah Belanja Netto		5.384.415.000,00	2.633.250.574,00	48,91

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi belanja periode 30 Juni 2024 mengalami penurunan sebesar Rp.74.787.202 atau sebesar 2,76% dibandingkan realisasi periode 30 Juni 2023. Penurunan realisasi ini terdapat pada belanja pegawai dan belanja modal. Penurunan realisasi pada belanja pegawai disebabkan adanya pegawai yang mutasi keluar di tahun 2024 dan tidak ada penggantinya, sehingga mengakibatkan menurunnya realisasi pegawai. Pada belanja modal terjadi penurunan juga, karena di tahun 2024 tidak mendapatkan anggaran belanja modal. Sedangkan pada belanja barang mengalami peningkatan disebabkan karena kegiatan di semester I tahun 2024 lebih banyak daripada semester I tahun 2023. Perbandingan realisasi belanja periode 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dan TA 2023

(dalam rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/ (Penurunan)	
		TA 2024	TA 2023	(Rp)	%
51	Belanja Pegawai	1.962.612.379,00	2.078.430.383,00	(115.818.004,00)	(5,57)
52	Belanja Barang	670.638.195,00	619.707.393,00	50.930.802,00	8,22
53	Belanja Modal	-	9.900.000,00	(9.900.000,00)	(100,00)
Jumlah Belanja Netto		2.633.250.574,00	2.708.037.776,00	(74.787.202,00)	(2,76)

B.2 Belanja Pegawai

Belanja
Pegawai
Rp.1.962.612.379

Realisasi Belanja Pegawai periode 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.1.962.612.379 dan Rp.2.078.430.383. Realisasi Belanja Pegawai mengalami penurunan sebesar Rp.115.818.004 atau 5,57% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai periode 30 Juni 2023. Hal ini disebabkan adanya pegawai yang mutasi keluar di tahun 2024 dan tidak ada penggantinya, yang mengakibatkan menurunnya realisasi belanja pegawai.

Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Perbandingan Belanja Pegawai TA 2024 dan TA 2023

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2024	TA 2023	(Rp)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	780.578.160,00	783.694.280,00	(3.116.120,00)	(0,40)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	12.442,00	11.296,00	1.146,00	10,15
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	56.953.788,00	56.205.892,00	747.896,00	1,33
Belanja Tunj. Anak PNS	14.105.849,00	16.032.898,00	(1.927.049,00)	(12,02)
Belanja Tunj. Struktural PNS	23.040.000,00	23.040.000,00	-	-
Belanja Tunj. Fungsional PNS	807.600.000,00	915.580.000,00	(107.980.000,00)	(11,79)
Belanja Tunj. PPh PNS	147.991.904,00	128.441.871,00	19.550.033,00	15,22
Belanja Tunj. Beras PNS	38.092.920,00	42.800.220,00	(4.707.300,00)	(11,00)
Belanja Uang Makan PNS	79.783.000,00	96.504.000,00	(16.721.000,00)	(17,33)
Belanja Tunjangan Umum PNS	14.455.000,00	16.120.000,00	(1.665.000,00)	-
Belanja Uang Lembur				
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)				
Realisasi Belanja Bruto	1.962.613.063,00	2.078.430.457,00	(115.817.394,00)	(5,57)
Pengembalian	684,00	74,00	(610,00)	-
Realisasi Belanja Netto	1.962.612.379,00	2.078.430.383,00	(115.818.004,00)	(5,57)

B.3 Belanja Barang

Belanja
Barang
Rp.670.638.195

Realisasi Belanja Barang periode 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.670.638.195 dan Rp.619.707.393. Realisasi Belanja Barang mengalami peningkatan sebesar Rp.50.930.802 atau 8,22% dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang periode 30 Juni 2023. Hal ini disebabkan karena kegiatan di semester I tahun 2024 lebih banyak daripada di semester I tahun 2023. Sehingga mempengaruhi realisasi belanja barang.

Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Perbandingan Belanja Barang TA 2024 dan TA 2023

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2024	TA 2023	(Rp)	%
Belanja Barang Operasional	389.653.290,00	407.631.600,00	(17.978.310,00)	(4,41)
Belanja Barang Non Operasional	-	7.840.000,00	(7.840.000,00)	-
Belanja Barang Persediaan	13.751.440,00	19.571.700,00	(5.820.260,00)	(29,74)
Belanja Jasa	42.106.633,00	53.432.033,00	(11.325.400,00)	(21,20)
Belanja Pemeliharaan	174.659.544,00	102.308.060,00	72.351.484,00	70,72
Belanja Perjalanan Dinas	50.467.288,00	28.924.000,00	21.543.288,00	74,48
Realisasi Belanja Bruto	670.638.195,00	619.707.393,00	50.930.802,00	8,22
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	670.638.195,00	619.707.393,00	50.930.802,00	8,22

B.4 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal periode 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp.9.900.000. Realisasi Belanja Modal mengalami penurunan sebesar Rp.9.900.000,- atau 100% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal periode 30 Juni 2023. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2024 tidak mendapatkan anggaran belanja modal. Sehingga mempengaruhi realisasi belanja modal.

Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini:

Belanja
Modal
Rp. 0

Tabel 7. Perbandingan Belanja Modal TA 2024 dan TA 2023

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2024	TA 2023	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	9.900.000,00	(9.900.000,00)	(100,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	100,00
Belanja Modal Jaringan	-	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-	-
Realisasi Belanja Bruto	-	9.900.000,00	(9.900.000,00)	(100,00)
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	-	9.900.000,00	(9.900.000,00)	(100,00)

B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.9.900.000. Realisasi Belanja Modal peralatan dan mesin mengalami penurunan sebesar Rp.9.900.000 atau 100% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal peralatan dan mesin periode 30 Juni 2023. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2024 tidak mendapatkan anggaran belanja modal peralatan dan mesin. Sehingga mempengaruhi realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2024. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 8. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan TA 2023

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2024	TA 2023	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	9.900.000,00	(9.900.000,00)	(100,00)
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola	-	-	-	-
Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
Realisasi Belanja Bruto	-	9.900.000,00	(9.900.000,00)	(100,00)
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	-	9.900.000,00	(9.900.000,00)	(100,00)

B.4.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan periode 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp. 0. Realisasi Belanja Modal gedung dan bangunan periode 30 Juni 2024, sama jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Gedung dan bangunan periode 30 Juni 2023. Hal ini disebabkan karena di semester I tahun 2024 dan tahun 2023 tidak mendapatkan anggaran belanja modal gedung dan bangunan. Sehingga mempengaruhi realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2024.

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 9. Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dan TA 2023

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2024	TA 2023	(Rp)	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Realisasi Belanja Bruto	-	-	-	-
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	-	-	-	-

B.4.3 Belanja Modal Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jaringan periode 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Rincian Belanja Modal Jaringan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 10. Perbandingan Belanja Modal Jaringan TA 2024 dan TA 2023

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2024	TA 2023	(Rp)	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-	-
Realisasi Belanja Bruto	-	-	-	-
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	-	-	-	-

B.4.4 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya periode 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Realisasi Belanja Modal Lainnya tidak mengalami perubahan.

Rincian Belanja Modal Lainnya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 11. Perbandingan Belanja Modal Lainnya TA 2024 dan TA 2023

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2024	TA 2023	(Rp)	%
Belanja Modal Lainnya	-	-	-	-
Realisasi Belanja Bruto	-	-	-	-
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	-	-	-	-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp. 30.000.000

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.30.000.000. dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

*Tabel 12. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
Per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023*

(dalam rupiah)

No.	Keterangan	30 Juni TA 2024	31 Desember TA 2023
1.	Uang Persediaan	30.000.000,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Bangkalan per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1	Kuitansi yang belum di GU kan	Rp 1.544.000,00
2	Di Brankas Bendahara	Rp 28.456.000,00
3	Di rekening	Rp -
	Total	Rp 30.000.000,00
	Ls Bendahara	Rp -
	Pajak	Rp -
	Pengembalian LS Remun	Rp -
	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 30.000.000,00

C.2 Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

Belanja Dibayar
Dimuka (Prepaid)
Rp.0

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.483.604,00.

Tabel 13. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	Jenis	30 Juni 2024	31 Desember 2023
1	Belanja Dibayar Dimuka	-	483.604,00
JUMLAH		-	483.604,00

Rincian Belanja dibayar dimuka

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
	Jumlah	0	

C.3 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan Pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir Tahun Anggaran per tanggal pelaporan.

Piutang Bukan
Pajak
Rp.0

Tabel 14. Rincian Piutang Bukan Pajak Per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	Jenis	30 Juni 2024	31 Desember 2023
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
	JUMLAH	-	

Atas rincian Piutang Bukan Pajak diatas, jumlah yang telah disetorkan ke Kas Negara, antara lain:

No.	Uraian	Piutang PNBP	Telah disetorkan di Tahun 2024	Sisa
				-
				-
				-
				-
	JUMLAH		-	-

C.4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih-
Piutang Bukan
Pajak
Rp.0

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp0.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang/debitur.

Tabel 15. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak Per 30 Juni 2024

(dalam rupiah)

No.	Jumlah Debitur	Kualitas	Nilai Bagian Lancar	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Nihil					

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan
Ganti Rugi
Rp.0

Bagian Lancar pada Pengadilan Agama Bangkalan berasal dari Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0. Bagian Lancar Tagihan TGR merupakan Tagihan TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Tabel 16. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023*

(dalam rupiah)

No	Uraian	30 Juni 2024	31 Desember 2023
		-	
JUMLAH		-	-

C.6 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih -
Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan
Ganti Rugi (TGR)
Rp0

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan sebesar Rp.0,00.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang/debitur.

Tabel 17. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

Per 30 Juni 2024

(dalam rupiah)

No.	Jumlah Debitur	Kualitas	Nilai Bagian Lancar	Penyisihan	Nilai Penyisihan
NIHIL					

C.7 Persediaan

Persediaan
Rp.3.299.490

Nilai Persediaan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.3.299.490 dan Rp.738.200, terjadi kenaikan sebesar Rp.2.561.290 atau 346,96%.

Persediaan merupakan jenis Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 18. Rincian Persediaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	Mutasi	30 Juni 2024
1	Barang Konsumsi	738.200,00	2.561.290,00	3.299.490,00
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-	-
3	Persediaan lainnya	-	-	-
Jumlah		738.200,00	2.561.290,00	3.299.490,00

C.8 Tanah

Tanah
Rp.10.277.875.000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Pengadilan Agama Bangkalan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.10.277.875.000 dan Rp.10.277.875.000.

Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	10.277.875.000,00
Mutasi tambah:	0,00
Mutasi kurang:	0,00
Jumlah Mutasi	0,00
Saldo per 30 Juni 2024	10.277.875.000,00

Tabel 19. Rincian Saldo Tanah Per 30 Juni 2024

JENIS BMN	NUP	TANAH MILIK SENDIRI			LUAS TANAH (m2)	NILAI PEROLEHAN
		NO DAN TANGGAL SERTIFIKAT	ALAMAT LOKASI TANAH	KEPEMILIKAN ATAS NAMA		
Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	1	Nomor 7, tanggal 2 Juli 2001	Jl. Soekarno Hatta No. 19 Bangkalan	Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI	1.200	5.117.040.000,00
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Nomor 38, tanggal 28 Desember 2010	Jl. Soekarno Hatta No.49 Bangkalan	Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI	2.524	5.160.835.000,00
Jumlah Halaman I						10.277.875.000,00

C.9 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin Rp.
2.773.418.298

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp.2.773.418.298 dan Rp.2.773.418.298.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	2.773.418.298
Pembelian	-
Pengembangan Nilai Aset	
Reklasifikasi Masuk	
Penyelesaian Pembangunan dgn KDP	
Transfer Masuk	-
Hibah	-
Koreksi	
Jumlah Mutasi Tambah	-
Transfer Keluar	
Reklasifikasi Keluar	
Henti guna	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 30 Juni 2024	2.773.418.298
Akumulasi Penyusutan	(2.289.637.947)
Nilai Buku	483.780.351

C.10 Gedung dan Bangunan

Gedung dan
Bangunan
Rp.7.195.003.500

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp.7.195.003.500 dan Rp.7.195.003.500.

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	7.195.003.500,00
Jumlah Mutasi Tambah (pengembangan nilai aset)	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 30 Juni 2024	7.195.003.500,00
Akumulasi Penyusutan	(1.669.190.832,00)
Nilai Buku	5.525.812.668,00

C.11 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Jalan, Irigasi
dan Jaringan Rp
0

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	
Jumlah Mutasi Tambah	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 30 Juni 2024	-
Akumulasi Penyusutan	
Nilai Buku	

C.12 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp.1.501.309 dan Rp.1.501.309.

Aset Tetap
Lainnya
Rp.1.501.309

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	1.501.309,00
Pembelian	
Transfer Masuk	-
Jumlah Mutasi Tambah	-
Transfer Keluar	
Jumlah Mutasi Kurang	
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 30 Juni 2024	1.501.309,00
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku	1.501.309,00

C.13Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp.0 dan Rp.0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan pembangunan gedung tempat kerja yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Pengadilan Agama Bangkalan pada tanggal pelaporan, disajikan pada tabel dibawah:

Saldo per 31 Desember 2023	-
Perolehan KDP	
Pengembangan KDP	
Jumlah Mutasi Tambah	
Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi	
Jumlah Mutasi Kurang	
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 30 Juni 2024	-

Konstruksi
 Dalam
 Pengerjaan Rp
 0

C.14 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap Rp.
4.032.159.849

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp.4.032.159.849 dan Rp.3.882.063.341, terjadi kenaikan sebesar Rp.150.096.508 atau 3,87%.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2024 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 20. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.773.418.298	(2.289.637.947)	483.780.351
2	Gedung dan Bangunan	7.195.003.500	(1.742.521.902)	5.452.481.598
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	1.501.309	-	1.501.309
Jumlah		9.969.923.107	(4.032.159.849)	5.937.763.258

C.15 Piutang Tagihan TP/TGR

Piutang
Tagihan TP/TGR
Rp.0

Nilai Piutang Tagihan TP/TGR per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp.0 dan Rp.0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada Bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian Negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan Bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara karena kelalaiannya.

Piutang Tagihan pada Pengadilan Agama Bangkalan berasal dari Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Rincian saldo Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut :

No	Uraian	30 Juni 2024	31 Desember 2023
JUMLAH		-	-

C.16 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR

Saldo Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp.0 dan Rp.0.

Penyisihan

Piutang Tidak

Tertagih -

Tagihan TP/TGR

Rp.0

No.	Jumlah Debitur	Kualitas	Nilai Bagian Lancar Semester I Tahun 2024	Penyisihan	Nilai Penyisihan
					-
Total			-		-

C.17 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud(ATB) per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp.0 dan Rp.0.

Aset Tak

Berwujud Rp

0

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai Berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	-
Jumlah Mutasi Tambah	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 30 Juni 2024	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku	-

C.18 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp.19.636.500 dan Rp.170.018.719. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Badan Urusan Administrasi serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Aset Lain-Lain

Rp.19.636.500

Adapun mutasi Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	170.018.719,00
Penghapusan	150.382.219,00
Jumlah Mutasi Kurang	150.382.219,00
Jumlah Mutasi	150.382.219,00
Saldo per 30 Juni 2024	19.636.500,00
Akumulasi Penyusutan	(19.636.500,00)
Nilai Buku	-

C.19 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp.(19.636.500)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp (19.636.500) dan Rp (170.018.719). Akumulasi Penyusutan tersebut merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 30 Juni 2024 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 21. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud			-
2	Aset Lain-Lain	19.636.500,00	(19.636.500,00)	-
Jumlah		19.636.500,00	(19.636.500,00)	-

C.20 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp.269.879.018

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.269.879.018 dan Rp.1.668.021. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Utang pada pihak ketiga per 30 Juni 2024 adalah berupa Gaji induk PNS bulan Juli 2024 sebesar Rp.228.530.018 dan Honor PPNPN bulan Juni 2024 sebesar Rp.41.349.000. Dimana SPM pengajuan Gaji Induk PNS dan Honor PPNPN tersebut diajukan di bulan Juni, sedangkan SP2D di bulan Juli 2024.

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Beban pegawai yang masih harus dibayar	228.530.018	Gaji Induk PNS bulan Juli 2024
2	Beban barang yang masih harus dibayar	41.349.000	Honor PPNPN bulan Juni 2024
Jumlah		269.879.018	

C.21 Utang yang belum ditagihkan

Utang yang belum ditagihkan Rp.1.544.000

Jumlah Utang yang belum ditagihkan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.1.544.000 dan Rp.0. Utang yang belum ditagihkan merupakan utang yang belum diterima tagihannya atau Utang akrual saat ada transaksi UP. Pengakuan dan Pencatatannya berdasarkan dokumen kuitansi. Utang yang belum ditagihkan per 30 Juni 2024 adalah berupa kuitansi UP yang belum diGUPkan sebesar Rp.1.544.000.

Rincian Utang yang belum ditagihkan

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Utang yang belum diterima tagihannya	1.544.000	Kuitansi UP bulan Juni 2024
Jumlah		1.544.000	

C.22 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima Dimuka Rp0,00

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp.0 dan Rp.0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari pendapatan sewa tanah/gedung yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

No	Uraian	Jumlah
NIHIL		

C.23 Uang Muka dari KPPN

Uang muka dari
KPPN Rp.
30.000.000

Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.30.000.000 dan Rp.0.

Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.24 Ekuitas

Ekuitas Rp.
15.947.514.730

Ekuitas per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.15.947.514.730 dan Rp.16.365.288.549. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB
Rp.0

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Tabel 22. Perbandingan Rincian Pendapatan 30 Juni 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun) %
Pendapatan PNB Lainnya				
Pendapatan dari pengelolaan BMN serta Pendapatan dari Penjualan				
1	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan			-
Jumlah Pendapatan BMN serta Pendapatan dari Penjualan		0,00	0,00	-
Pendapatan Lain-Lain				
1	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian	0,00	0,00	-
2	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0,00	0,00	-
Jumlah Pendapatan Lain-Lain		0,00	0,00	-
Total		0,00	0,00	-

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp.2.191.142.397

Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.2.191.142.397 dan Rp.2.309.359.701. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Rincian Beban Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 23. Perbandingan Rincian Beban Pegawai 30 Juni 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun) %
1	Beban Gaji Pokok PNS	877.766.080,00	882.713.280,00	(0,56)
2	Beban Pembulatan Gaji PNS	13.061,00	12.221,00	6,87
3	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	63.633.694,00	63.258.592,00	0,59
4	Beban Tunj. Anak PNS	16.056.102,00	17.937.804,00	(10,49)
5	Beban Tunj. Struktural PNS	25.920.000,00	25.920.000,00	-
6	Beban Tunj. Fungsional PNS	908.550.000,00	1.016.765.000,00	(10,64)
7	Beban Tunj. PPh PNS	160.190.400,00	140.026.924,00	14,40
8	Beban Tunj. Beras PNS	42.945.060,00	48.086.880,00	(10,69)
9	Beban Uang Makan PNS	79.783.000,00	96.504.000,00	(17,33)
10	Beban Tunjangan Umum PNS	16.285.000,00	18.135.000,00	(10,20)
11	Beban Uang Lembur	0,00	0,00	-
12	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0,00	0,00	-
Total		2.191.142.397,00	2.309.359.701,00	(5,12)

D.3Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp.8.358.350

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.8.358.350 dan Rp.11.935.475. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Tabel 24. Perbandingan Rincian Beban Persediaan 30 Juni 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun) %
1	Beban Persediaan Konsumsi	8.358.350,00	11.935.475,00	(29,97)
2	Beban Persediaan Lainnya			
Total		8.358.350,00	11.935.475,00	(29,97)

D.4Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan
Jasa Rp.472.368.506

Beban Barang dan Jasa pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.472.368.506 dan Rp.521.355.498. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 25. Rincian Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun) %
1	Beban Keperluan Perkantoran	408.625.090,00	416.924.600,00	(1,99)
2	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0,00	0,00	-
3	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	284.700,00	294.500,00	(3,33)
4	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	21.580.000,00	30.085.000,00	(28,27)
5	Beban Barang Operasional Lainnya	956.500,00	3.891.500,00	(75,42)
7	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	0,00	-
	Beban Peralatan dan Mesin (Ekstrakomptabel)	0,00	17.640.000,00	-
8	Beban Barang Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	-
9	Beban Langganan Listrik	0,00	0,00	-
10	Beban Langganan Telepon	950.692,00	1.110.028,00	(14,35)
11	Beban Langganan Air	11.425.800,00	5.899.400,00	93,68
12	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0,00	0,00	-
13	Beban Jasa Konsultan	0,00	0,00	-
14	Beban Sewa	28.545.724,00	45.510.470,00	(37,28)
15	Beban Jasa Profesi	0,00	0,00	-
16	Beban Jasa Lainnya (covid-19)	0,00	0,00	-
	Total	472.368.506,00	521.355.498,00	(9,40)

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Rp.178.591.344

Beban pemeliharaan pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.178.591.344 dan Rp.113.398.659. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Rincian Beban Pemeliharaan 30 Juni 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun) %
1	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	121.285.701,00	55.662.375,00	117,90
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	2.578.000,00	2.500.000,00	100,00
3	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	51.895.843,00	50.255.584,00	3,26
4	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Penanganan Covid-19)	0,00	0,00	-
5	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	2.831.800,00	4.980.700,00	(43,14)
Total		178.591.344,00	113.398.659,00	57,49

D.6Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan

Dinas Rp.50.467.288

Beban Perjalanan Dinas pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.50.467.288 dan Rp.37.120.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 27. Rincian Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun) %
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	50.467.288,00	37.120.000,00	35,96
2	Beban Perjalanan Dinas dalam Kota			
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota			
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota			
5	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri			
Total		50.467.288,00	37.120.000,00	35,96

D.7Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan

dan Amortisasi

Rp.150.096.508

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.150.096.508 dan Rp.151.714.337. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 28. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 30 Juni 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun) %
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	76.765.438,00	(100,00)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	73.331.070,00	(100,00)
3	Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan			
Jumlah Penyusutan		0,00	150.096.508,00	(100,00)
1	Beban Amortisasi Software			
2	Beban Amortisasi Lisensi			
Jumlah Amortisasi		0,00	0,00	-
1	Beban Penyusutan Aset Lain-Lain			
Total		0,00	150.096.508,00	(100,00)

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp.0

Tabel 29. Rincian Beban Piutang tak Tertagih 30 Juni 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun) %
1	Beban Penyisihan Piutang PNBK			
2	Beban Penyisihan Piutang Lainnya			
3	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR			
4	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang			
Total		-	-	#DIV/0!

D.10 Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional Rp.0

Surplus dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian atas Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 30. Rincian Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun) %
1	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya			
2	Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara			
3	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL			
4	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-		
5	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL			
6	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	-
7	Beban Penyesuaian nilai Persediaan	-	-	-
8	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Total		-	-	-

0

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Rp. Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.16.365.288.549 dan Rp. 16.240.655.776.
16.365.288.549

E.2 Defisit LO

Defisit LO Rp. Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah defisit sebesar Rp (3.051.024.393) dan Rp (3.144.883.670). Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.
(3.051.024.393)

E.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp. 0 Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp.0.

E.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp. 0 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi lain-lain Rp.0 Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.6 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas Rp.2.633.250.574 Nilai transaksi antar ekuitas pada tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.2.633.250.574 dan Rp.2.742.775.276. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	2.633.250.574
Diterima dari Entitas Lain	-
Transfer Masuk	0,00
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
	2.633.250.574,00

E.6.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

DDEL Rp.0 dan DKEL Rp.2.633.250.574 Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2024, DDEL sebesar Rp.0 sedangkan DKEL sebesar Rp.2.633.250.574.

E.6.2 Transfer masuk

Transfer masuk Rp. 0 Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL, dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp.0.

E.7 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Rp. 15.947.514.730 Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.15.947.514.730 dan Rp.15.838.547.382.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca per 30 Juni 2024 pada Pengadilan Agama Bangkalan yang mempengaruhi penyajian posisi Laporan Keuangan per 30 Juni 2024.

F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Pada Tahun Anggaran 2024 sampai dengan 30 Juni 2024, satker Pengadilan Agama Bangkalan tidak terdapat temuan dan tindak lanjut temuan dari BPK.

F.3. Pengungkapan Lain-Lain

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bangkalan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 menyajikan pengungkapan-pengungkapan yang meliputi:

1. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Bangkalan adalah BRI. Cabang Bangkalan berupa rekening virtual A/C 653244015451000 a.n. BPg 036 PA Bangkalan yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp.0,-

2. Revisi DIPA

DIPA pada Pengadilan Agama Bangkalan Tahun Anggaran 2024 bernomor : DIPA-005.01.2.401545/2024 tanggal 24 Nopember 2023 berjumlah sebesar Rp.5.384.415.000 (Lima milyar tiga ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. DIPA Awal

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Semula (Rp)
005.01.WA		
6986.EBA		
6986.EBA.994	511111	1.509.542.000,00
	511119	19.000,00
	511121	126.158.000,00
	511122	31.295.000,00
	511123	40.320.000,00
	511124	1.593.830.000,00
	511125	215.150.000,00
	511126	66.916.000,00

	511129	274.744.000,00
	511151	28.140.000,00
	521111	787.160.000,00
	521114	3.240.000,00
	521115	51.792.000,00
	521119	10.910.000,00
	521811	31.108.000,00
	522112	10.008.000,00
	522113	12.000.000,00
	522141	74.915.000,00
	523111	231.346.000,00
	523119	43.530.000,00
	523121	176.532.000,00
	524111	65.760.000,00
	Total	5.384.415.000,00

b. Revisi DIPA 1 (Tanggal 21 Pebruari 2024)

Tidak terdapat perubahan nilai pagu, hanya menyesuaikan halaman III DIPA berupa rencana penarikan dana dan pergeseran pagu beberapa akun belanja barang.

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Semula (Rp)	Menjadi (Rp)
005.01.WA			
6986.EBA			
6986.EBA.994	511111	1.509.542.000,00	1.509.542.000,00
	511119	19.000,00	19.000,00
	511121	126.158.000,00	126.158.000,00
	511122	31.295.000,00	31.295.000,00
	511123	40.320.000,00	40.320.000,00
	511124	1.593.830.000,00	1.593.830.000,00
	511125	215.150.000,00	215.150.000,00
	511126	66.916.000,00	66.916.000,00
	511129	274.744.000,00	274.744.000,00
	511151	28.140.000,00	28.140.000,00
	521111	787.160.000,00	787.160.000,00
	521114	3.240.000,00	3.240.000,00
	521115	51.792.000,00	51.792.000,00
	521119	10.910.000,00	10.910.000,00
	521811	31.108.000,00	31.108.000,00
	522112	10.008.000,00	10.008.000,00
	522113	12.000.000,00	12.000.000,00
	522141	74.915.000,00	75.395.000,00

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA BANGKALAN SEMESTER I TAHUN 2024

	523111	231.346.000,00	231.346.000,00
	523119	43.530.000,00	43.530.000,00
	523121	176.532.000,00	176.052.000,00
	524111	65.760.000,00	65.760.000,00
	Total	5.384.415.000,00	5.384.415.000,00

c. Revisi ke 2 (Tanggal 23 April 2024)

Tidak terdapat perubahan nilai pagu, hanya menyesuaikan halaman III DIPA berupa rencana penarikan dana dan ada pergeseran di beberapa akun belanja barang.

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Semula (Rp)	Menjadi (Rp)
005.01.WA			
6986.EBA			
6986.EBA.994	511111	1.509.542.000,00	1.509.542.000,00
	511119	19.000,00	19.000,00
	511121	126.158.000,00	126.158.000,00
	511122	31.295.000,00	31.295.000,00
	511123	40.320.000,00	40.320.000,00
	511124	1.593.830.000,00	1.593.830.000,00
	511125	215.150.000,00	215.150.000,00
	511126	66.916.000,00	66.916.000,00
	511129	274.744.000,00	274.744.000,00
	511151	28.140.000,00	28.140.000,00
	521111	787.160.000,00	781.368.000,00
	521114	3.240.000,00	3.240.000,00
	521115	51.792.000,00	51.792.000,00
	521119	10.910.000,00	10.910.000,00
	521811	31.108.000,00	31.108.000,00
	522112	10.008.000,00	15.600.000,00
	522113	12.000.000,00	12.000.000,00
	522141	75.395.000,00	75.595.000,00
	523111	231.346.000,00	231.346.000,00
	523119	43.530.000,00	43.530.000,00
	523121	176.052.000,00	176.052.000,00
	524111	65.760.000,00	65.760.000,00
	Total	5.384.415.000,00	5.384.415.000,00

d. Revisi ke 3 (Tanggal 4 Juni 2024)

Tidak terdapat perubahan nilai pagu, hanya menyesuaikan halaman III DIPA berupa rencana penarikan dana dan ada pergeseran di beberapa detil akun belanja perjalanan dinas.

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Semula (Rp)	Menjadi (Rp)
005.01.WA			
6986.EBA			
6986.EBA.994	511111	1.509.542.000,00	1.509.542.000,00
	511119	19.000,00	19.000,00
	511121	126.158.000,00	126.158.000,00
	511122	31.295.000,00	31.295.000,00
	511123	40.320.000,00	40.320.000,00
	511124	1.593.830.000,00	1.593.830.000,00
	511125	215.150.000,00	215.150.000,00
	511126	66.916.000,00	66.916.000,00
	511129	274.744.000,00	274.744.000,00
	511151	28.140.000,00	28.140.000,00
	521111	781.368.000,00	781.368.000,00
	521114	3.240.000,00	3.240.000,00
	521115	51.792.000,00	51.792.000,00
	521119	10.910.000,00	10.910.000,00
	521811	31.108.000,00	31.108.000,00
	522112	15.600.000,00	15.600.000,00
	522113	12.000.000,00	12.000.000,00
	522141	75.595.000,00	75.595.000,00
	523111	231.346.000,00	231.346.000,00
	523119	43.530.000,00	43.530.000,00
	523121	176.052.000,00	176.052.000,00
	524111	65.760.000,00	65.760.000,00
Total		<u>5.384.415.000,00</u>	<u>5.384.415.000,00</u>

Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bangkalan Nomor : 13/SEK/SK.KU.1/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Pejabat Penguji/Penandatanganan Surat Permintaan Membayar, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Staf Pengelola Keuangan Di Pengadilan Agama Bangkalan, Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Bangkalan Nomor : 14/SEK/SK.KU.1/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor 15/SEK/SK.KU.1/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan pada Pengadilan Agama Bangkalan, telah menunjuk,

Kuasa Pengguna Anggaran	: Aris Dwi Sutyono,S.T.,S.H:
Pejabat Pembuat Komitmen	: Salma Nurkhafidoh,S.Kom
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Puspita Nur Astuti,S.E
Bendahara Pengeluaran	: Fatmawati,S.H
Bendahara Penerima	: Kharisma Dienna Sakhofi, A.Md
Staf pengelola Keuangan	: 1. Faiza Amalia Yunan, S.Ak. 2. Intan Pratiwi, S.E.

Pada bulan Mei 2024 terjadi pergantian pejabat pengelola keuangan, dikarenakan ada pegawai Pengadilan Agama Bangkalan yang lulus sertifikasi Bendahara Penerima. Berdasarkan keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Bangkalan Nomor : 1083/SEK.PA.W13-A30/SK.KU.1/V/2024 tanggal 7 Mei 2024 tentang Penunjukan Bendahara Penerima Di Pengadilan Agama Bangkalan, telah menunjuk,

Bendahara Penerima	: Wahyu Indah Rahmawati, A.Md
--------------------	-------------------------------

LAMPIRAN A.1

TABEL PENYUSUTAN SEMESTER I TA. 2024

KOD E	URAIAN	MM	KUAN TITAS	NILAI	AK. PENYUSUTAN PER 31 Desember 2023	BEBAN PENYUSUTAN PERIODE INI	AK. PENYUSUTAN PERIODE INI	AK. PENYUSUTAN PER 30 Juni 2024	NILAI BUKU PER 30 Juni 2024
132111	PERALATAN DAN MESIN		658	2.818.748.748	(2.236.523.444)	(80.146.583)	0	(2.316.670.027)	502.078.721
3.01.03	ALAT BANTU	7	1	293.100.000	(20.935.714)	(20.935.714)	0	(41.871.428)	251.228.572
3.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7	7	403.864.817	(403.864.817)	0	0	(403.864.817)	0
3.05.01	ALAT KANTOR	5	86	223.105.200	(221.194.440)	(308.680)	0	(221.503.120)	1.602.080
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	5	441	812.935.730	(721.264.161)	(13.087.367)	0	(734.351.528)	78.584.202
3.06.01	ALAT STUDIO	5	14	100.165.420	(59.999.546)	(6.556.782)	0	(66.556.328)	33.609.092
3.06.02	ALAT KOMUNIKASI	5	6	9.985.000	(9.985.000)	0	0	(9.985.000)	0
3.07.01	ALAT KEDOKTERAN	5	1	705.000	(564.000)	(70.500)	0	(634.500)	70.500
3.10.01	KOMPUTER UNIT	4	59	712.042.189	(573.472.874)	(31.555.040)	0	(605.027.914)	107.014.275
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER	4	40	262.679.392	(225.076.892)	(7.632.500)	0	(232.709.392)	29.970.000
3.19.01	PERALATAN OLAH RAGA	3	2	166.000	(166.000)	0	0	(166.000)	0

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA BANGKALAN SEMESTER I TAHUN 2024

1331 11	GEDUNG DAN BANGUNAN		3	7.195.003.500	(1.669.190.832)	(73.331.070)	0	(1.742.521.902)	5.452.481.598
4.01. 01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	50	3	7.195.003.500	(1.669.190.832)	(73.331.070)	0	(1.742.521.902)	5.452.481.598
1351 21	ASET TETAPLAINNYA		19	1.501.309	0	0	0	0	1.501.309
6.01. 01	BAHAN PERPUSTAKAAN TRECETAK		19	1.501.309	0	0	0	0	1.501.309
1661 12	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN		42	19.636.500	(170.518.719)	150.882.219	0	(19.636.500)	0
3.02. 01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7	4	19.636.500	(19.636.500)	0	0	(19.636.500)	0
3.03. 02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	5	1	0	(50.000)	50.000		0	0
3.05. 02	ALAT RUMAH TANGGA	5	28	0	(9.329.200)	9.329.200		0	0
3.10. 01	KOMPUTER UNIT	4	9	0	(141.503.019)	141.503.019	0	0	0
TOTAL				10.034.890.057	(4.076.232.995)	(2.595.434)	0	(4.078.728.429)	5.956.061.628